

---

**Analisis Pengelolaan Keuangan BUMDes Berdasarkan Prinsip *Good Corporate Governance*  
Desa Tounelet Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa**

Christy Audina Tenda  
Joanne V. Mangindaan  
Aneke Y. Punuindoong

Program Studi Administrasi Bisnis,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi Manado  
Email: [christyaudina20@gmail.com](mailto:christyaudina20@gmail.com)

---

**Abstract.** *The purpose of this study was to determine the financial management of village-owned enterprises based on the principles of good corporate governance in Tounelet village, Sonder District, Minahasa Regency. In this study using qualitative research methods. Data collection techniques, namely interviews and field observations. Data analysis using data reduction, data presentation and verification. The results of this study indicate that the financial management of the Tounelet village-owned enterprise from the planning, implementation, administration and accountability stages is still simple and there are still many shortcomings that need to be addressed. Financial management of village-owned enterprises based on good corporate governance from the principles of accountability, transparency, responsibility, independence, fairness and equality has been going well but has not been effective and there are still many things that need to be addressed. Therefore, this study concludes that the financial management of BUMDes in Tounelet village is not fully based on good corporate governance.*

**Keywords:** *financial management of village-owned enterprises, good corporate governance*

---

**Abstrak.** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance di Desa Tounelet Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara dan pengamatan lapangan. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan yang dilakukan BUMDes Tounelet dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban masih bersifat sederhana dan masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Pengelolaan Keuangan BUMDes berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance dari Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran dan Kesetaraan sudah berjalan namun belum efektif dan masih banyak yang perlu dibenahi. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa pengelolaan keuangan Bumdes di Desa Tounelet belum sepenuhnya berdasarkan prinsip good corporate governance.

**Kata Kunci:** *Pengelolaan Keuangan BUMDes, Good Corporate Governance*

---

### **Pendahuluan**

Pertumbuhan ekonomi desa seringkali dinilai lambat dibandingkan pembangunan ekonomi perkotaan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan mendorong gerak ekonomi desa melalui kewirausahaan desa, dimana kewirausahaan desa menjadi strategi dalam pengembangan dan pertumbuhan kesejahteraan. Kewirausahaan desa ini dapat diwadahi dalam Badan Usaha Milik Desa yang dikembangkan oleh pemerintah maupun masyarakat desa. BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kerekatan sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

Dalam pengelolaan keuangan tentu perlu diterapkan suatu tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance). Hal ini dikarenakan untuk penerapannya dinilai penting diberbagai lembaga. Good corporate governance merupakan sebuah konsep yang diajukan dalam meningkatkan kinerja perusahaan melalui monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Demi tercapainya pengelolaan perusahaan atau lembaga yang lebih transparan bagi semua laporan keuangan diterapkannya konsep good corporate governance. Setiap organisasi memerlukan tata kelola yang baik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dan menjaga kesinambungan

jangka pendek dan jangka panjang (Harjito, Wibowo dan Suhardjanto 2016).

Berdasarkan hal di atas seperti halnya BUMDes di Desa Tounelet Kecamatan Sonder dalam pengelolaan yang ada sudah berjalan dengan baik mengikuti prosedur. Sehingga bantuan dana dari pemerintah desa, sudah dapat menjalankan usaha alat rental sound system dan usaha ternak babi. Dilihat dari kepengurusan yang ada BUMDes belum efektif dalam melaksanakan tahap-tahap pengelolaan keuangan yang ada. Dalam perkembangan sekarang ini pengelolaan BUMDes Tounelet cenderung tidak terkelola dengan baik, hal ini dilihat dari pengelolaan yang tidak lagi mengikuti prosedur. Dengan adanya permasalahan pengelolaan tentunya mempengaruhi kepengurusan dari pengurus BUMDes tersebut, oleh karena itu jika dalam pengelolaannya dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur tentunya BUMDes yang ada di Desa Tounelet akan berdampak baik. Sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat serta bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan serta dapat bersaing dengan BUMDes yang ada di desa lain.

### Tinjauan Pustaka

#### Badan Usaha Milik Desa

Menurut Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 angka 6 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

BUMDes adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa (Romadhon. 2020).

#### Pengelolaan Keuangan BUMDes

Dalam pengelolaan keuangan BUMDes terdapat tahapan rangkaian kegiatan yang berlangsung mengikuti siklus sebagai berikut (Hariawan Bihamding 2019:66-68):

##### 1. Perencanaan

Perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang.

##### 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan BUMDes merupakan implementasi penerapan atau eksekusi dari anggaran pendapatan badan usaha yang dijalankan.

##### 3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi yang sebenarnya berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh.

##### 4. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diberikan.

##### 5. Pertanggungjawaban

Ketua pengelola BUMDes menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan BUMDes akhir tahun anggaran ditetapkan dengan peraturan desa.

#### *Good Corporate Governance*

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan prinsip-prinsip yang mengarahkan dan pengendalian perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada stakeholder. Prinsip-Prinsip tersebut dijadikan sebagai perangkat standar yang bertujuan untuk memperbaiki citra, efisiensi dan tanggungjawab sosial perusahaan. Maka dari itu penerapan good corporate governance (GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perusahaan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Adapun prinsip-prinsip dasar dari asas good corporate governance menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) adalah sebagai berikut:

##### 1. Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan.

##### 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar.

##### 3. Responsibilitas (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

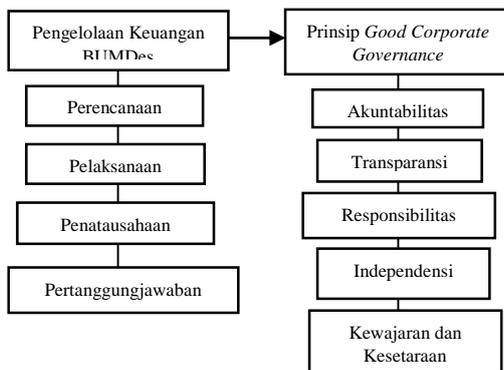
#### 4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervasi oleh pihak lain.

#### 5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

### Kerangka Pemikiran



### Metode Penelitian

Waktu dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini selama 6 bulan yaitu Februari-Juli tahun 2021. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang terdiri dari kepala desa, ketua, sekretaris dan bendahara BUMDes. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

### Hasil Penelitian

#### Reduksi Data dan Penyajian Data

##### 1. Perencanaan

Perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan Keuangan BUMDes disusun oleh Ketua dan staf pengelola BUMDes untuk dibahas dan disepakati bersama.

**Tabel 1 Rancangan Anggaran Biaya BUMDes Tounelet Tahun 2018**

No	Uraian	Vol. (Unit, Ekor, Kg)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>I.</b>	<b>Dana dari Pemerintah Desa</b>			<b>45.000.000</b>
1.	Pembelian Keyboard	1	13.500.000	13.500.000
2.	Pembelian induk babi	2	3.200.000	6.400.000
3.	Pembelian pakan induk	2	1.700.000	3.400.000
4.	Pembelian anak babi	10	700.000	7.000.000
5.	Pembelian pakan anak babi	10	1.400.000	14.000.000
6.	Biaya lain-lain	-	-	700.000
<b>II.</b>	<b>Total biaya yang dikeluarkan</b>			<b>45.000.000</b>

Sumber: *olah data*

**Tabel 2 Rancangan Anggaran Biaya BUMDes Tounelet Tahun 2019**

No	Uraian	Volume (Unit, Ekor, Kg)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
<b>I.</b>	<b>Dana dari Pemerintah Desa</b>			<b>45.000.000</b>
1.	Pembelian anak babi	20	450.000	9.000.000
2.	Pembelian pakan anak babi	20	1.700.000	34.000.000
3.	Biaya tenaga kerja			2.000.000
<b>II.</b>	<b>Total biaya yang dikeluarkan</b>			<b>45.000.000</b>

Sumber: *olah data*

BUMDes Tounelet melakukan perencanaan ketika memperoleh dana dari pemerintah desa atau dari pihak luar, jika tidak memperoleh dana BUMDes tidak melakukan perencanaan. Dan untuk tahun 2020 BUMDes tidak membuat rancangan anggaran biaya karena tidak menerima dana dari pihak luar.

##### 2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan berpedoman pada rancangan anggaran biaya yang dibentuk pada tahap perencanaan. Dana awal diberikan oleh pemerintah desa kepada pengurus Bumdes.

**Tabel 3 Pelaksanaan Anggaran BUMDes Tounelet Tahun 2018**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Diterima dana dari desa	45.000.000
2.	Pembelian keyboard	13.500.000
3.	Pembelian induk babi	6.400.000
4.	Pembelian pakan induk babi	3.400.000
5.	Pembelian anak babi starter	7.000.000
6.	Pembelian pakan anak babi	14.000.000
7.	Biaya lain-lain	700.000
<b>Total</b>		<b>Rp. 45.000.000</b>

Sumber: olah data

**Tabel 4 Pelaksanaan Anggaran BUMDes Tounelet Tahun 2019**

No	Uraian	Jumlah
1.	Modal	32.000.000
2.	Pembelian pakan induk babi	17.500.000
3.	Pembelian anak babi starter	2.500.000
4.	Pembelian pakan anak babi	7.500.000
5.	Biaya tenaga kerja	3.500.000
6.	Biaya Lain-lain	1.000.000
<b>Total</b>		<b>32.000.000</b>

Sumber: olah data

**Tabel 5 Pelaksanaan Anggaran BUMDes Tounelet Tahun 2020**

No	Uraian	Jumlah
1.	Diterima Dana dari Desa melalui Rekening bank SulutGo	45.000.000
2.	Pembelian anak babi starter	9.000.000
3.	Pembelian pakan anak babi starter	34.000.000
4.	Biaya tenaga kerja	2.000.000
<b>Total</b>		<b>45.000.000</b>

Sumber: olah data

Sisa dana pelaksanaan anggaran tahun 2019 di kembalikan kepada pemerintah desa karena pengurus BUMDes sudah mengundurkan diri dan akhir tahun 2019 terbentuk pengurus BUMDes yang baru. Di tahun 2020 dikarenakan adanya pandemi covid-19 usaha BUMDes menurun dan hanya dilaksanakan selama beberapa bulan, sehingga seluruh kegiatan usaha BUMDes terhenti sampai sekarang ini. Sisa dana pada pelaksanaan anggaran tahun 2020 dikembalikan juga kepada pemerintah desa untuk kegiatan usaha selanjutnya.

### 3. Penatausahaan

Berdasarkan Permendagri 113 Tahun 2014, penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, dalam hal ini dilakukan oleh bendahara Bumdes. Penatausahaan yang dilakukan oleh Bumdes

Tounelet masih sangat sederhana, uang masuk dan uang keluar hanya ditulis secara sederhana.

**Tabel 6 Uang Masuk dan Uang Keluar BUMDes Tounelet Periode I Tahun 2018**

No	Uraian	Jumlah
1.	Hasil Pendapatan	Rp. 54.000.000
2.	Pengeluaran	Rp. 45.000.000
<b>Profit</b>		<b>Rp. 9.000.000</b>

Sumber: olah data

**Tabel 7 Uang Masuk dan Uang Keluar BUMDes Tounelet Periode II Tahun 2018**

No	Uraian	Jumlah
1.	Hasil Pendapatan Periode	Rp. 86.000.000
2.	Pengeluaran Periode	Rp. 54.000.000
<b>Profit</b>		<b>Rp. 32.000.000</b>

Sumber: olah data

**Tabel 8 Uang Masuk dan Uang Keluar BUMDes Tounelet Periode I Tahun 2019**

No	Uraian	Jumlah
1.	Hasil Pendapatan Periode	Rp. 63.230.000
2.	Pengeluaran Periode	Rp. 35.000.000
<b>Profit</b>		<b>Rp.28.230.000</b>

Sumber: olah data

**Tabel 9 Uang Masuk dan Uang Keluar BUMDes Tounelet Periode II Tahun 2019**

No	Uraian	Jumlah
1.	Hasil Pendapatan Periode	Rp. 4.000.000
2.	Pengeluaran Periode	Rp. 3.000.000
<b>Profit</b>		<b>Rp. 1.000.000</b>

Sumber: olah data

**Tabel 10 Uang Masuk dan Uang Keluar BUMDes Tounelet Periode I Tahun 2020**

No	Uraian	Jumlah
1.	Hasil Pendapatan Periode	Rp. 51.300.000
2.	Pengeluaran Periode	Rp. 45.000.000
<b>Profit</b>		<b>Rp. 6.300.000</b>

Sumber: olah data

Di tahun 2020 hanya ada pencatatan selama 1 periode karena kegiatan usaha BUMDes hanya berjalan beberapa bulan dikarenakan adanya pandemi covid-19 sehingga kegiatan usaha terhenti.

### 4. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan bentuk tanggungjawab atas penggunaan dana yang telah dipercayakan kepada pengurus BUMDes Tounelet. pertanggungjawaban yang dilakukan yaitu dengan

memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPD dan ke Kabupaten Minahasa dengan membawa berkas-berkas yang dibutuhkan. Tetapi BUMDes Tounelet belum mempunyai dokumen resmi dalam pertanggungjawaban.

### **Pembahasan**

Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa Badan Usaha Milik Desa Tounelet dalam Pengelolaan Keuangan mulai dari Tahap *Perencanaan* sudah dilakukan oleh Bumdes Tounelet, tetapi hanya dilakukan apabila menerima dana dari pemerintah desa atau dana dari luar. Jika tidak menerima dana dari luar Bumdes tidak melakukan perencanaan. Pada Tahap *Pelaksanaan* sudah dilaksanakan oleh Bumdes Tounelet sesuai aturan yang ada. Pada Tahap *Penatausahaan* sudah dilakukan namun belum efektif, karena pencatatan keuangan yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa Tounelet masih sangat sederhana. Selanjutnya, Tahap *Pertanggungjawaban* Badan Usaha Milik Desa Tounelet belum melakukan Pertanggungjawaban sesuai dengan aturan yang ada.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Keuangan Bumdes mulai dari prinsip *Akuntabilitas* adalah bahwa Bumdes Tounelet sudah memuat keseluruhan posisi keuangan dari hasil wawancara dengan Bendahara Bumdes, pencatatan laporan keuangan yang dilakukan masih sangat sederhana belum efektif dan belum dilakukan dalam sistem akuntansi. Pada prinsip *Transparansi* pengelolaan keuangan Bumdes menunjukkan bahwa laporan keuangan yang dibuat Bumdes Tounelet sudah tepat waktu. Namun dilihat dari keadaan yang terjadi bahwa laporan keuangan Bumdes Tounelet belum dibuat laporan pertanggungjawabannya. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu pada pembuatan laporan keuangan Bumdes belum sesuai. Selanjutnya, laporan keuangan yang dibuat oleh Bumdes Tounelet belum cukup jelas karena laporan keuangan yang jelas harus memenuhi standar yang berlaku agar dapat dimengerti oleh seluruh pihak, sedangkan laporan keuangan Bumdes Tounelet belum sesuai dengan laporan keuangan SAK EMKM maka dikatakan bahwa laporan keuangan Bumdes Tounelet belum cukup jelas. Selanjutnya, laporan keuangan yang akurat dapat dilihat dari komponen-komponen yang dimasukkan dalam laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan yang dibuat Bumdes Tounelet hanya menampilkan beberapa indikator atau komponen saja. Sehingga dikatakan bahwa laporan keuangan Bumdes Tounelet belum akurat. Pada prinsip *Responsibilitas* menunjukkan bahwa Bumdes Tounelet melaksanakan kegiatan

usahanya sesuai dengan prinsip dan peraturan yang berlaku. Hal ini terbukti dari pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan perencanaan dan tidak ada kegiatan dalam perencanaan yang tidak dilaksanakan. Meskipun belum ada pertanggungjawaban yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan Bumdes Tounelet. Pada prinsip *Independensi* menunjukkan bahwa Bumdes Tounelet dalam melaksanakan tugasnya tidak ada intervensi dari pihak luar dan berjalan sesuai tupoksi yang berlaku. Dalam hal pengelolaan keuangan, Bumdes Tounelet melaksanakan sesuai dengan perencanaan dan sesuai dana yang ada. Selanjutnya pada prinsip *Kewajaran dan Kesetaraan* Pengelolaan Bumdes Tounelet adalah baik dalam tahap perencanaan sampai tahap pelaksanaan semua dilibatkan dalam proses kegiatan usaha yang dijalankan oleh Bumdes Tounelet. Akan tetapi dalam kegiatan yang dilakukan belum semua yang terlibat, dikarenakan beberapa pengurus Bumdes memiliki urusan/pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Tetapi dalam pengelolaan keuangan Bumdes Tounelet sudah memberikan informasi yang relevan agar tidak ada pihak yang dirugikan.

Maka penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari Nailly Rofidah (2019) dengan hasil penelitian bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Gondowangi masih bersifat sederhana. Yurie Adillya Bare (2021) dengan hasil penelitian bahwa implementasi good corporate governance berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan BUMDes Bawo kecamatan Tagulandang Utara.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Pengelolaan Keuangan BUMDes di Desa Tounelet Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Pengelolaan Keuangan yang dilakukan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tounelet masih bersifat sederhana. BUMDes Tounelet melakukan Pengelolaan Keuangan dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban, tetapi dalam tahap-tahap Pengelolaan Keuangan BUMDes Tounelet belum efektif masih banyak kekurangan dan perlu dibenahi. Pengelolaan Keuangan BUMDes berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance dari Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran dan Kesetaraan sudah berjalan namun belum efektif masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi. Kesimpulannya adalah Pengelolaan Keuangan BUMDes dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban belum sepenuhnya berdasarkan

Prinsip Good Corporate Governance dari Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, Responsibilitas, Independensi, Kesetaraan dan Kewajaran.

**Daftar Pustaka**

Romadhon. 2020. “Analisis Pengelolaan BUMDes Desa Teluk Pandan Rambahan Kabupaten Tebo”.

Harjito, Y. A. C. Wibowo, dan D. Suhardjanto. 2016. Telaah Kearifan Lokal terhadap Akuntabilitas Lumbung Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol.19: 71-75

Yurie, A. Bare. 2021. “Pengaruh Implementasi Good Corporate Governance Terhadap Pengelolaan Keuangan BUMDes

Rofidah, Naily. 2019. “Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMD) di Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang”. Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang.

Bihamding, Hariawan. 2019. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Yogyakarta: Deepublish